

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian.

Halking (2018 : 1206-1207) dalam kehidupan masyarakat kita seperti itu, maka dirasakan pentingnya pendidikan politik itu bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang kehidupan politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasan Habib bahwa alasan mengenai pentingnya pendidikan politik, karena adanya keterlantaran pendidikan (politik) dalam keluarga; pengaruh menyimpang kawan sepermainan, dan kurangnya partisipasi politik masyarakat yang otonom. Melalui pendidikan politik yang perlu dilakukan pendidikan politik secara sadar, terarah, dan terencana diharapkan persepsi negatif masyarakat tentang politik makin lama makin terhapus dan tumbuh suatu pengertian yang wajar tentang politik, mereka tidak takut berkecimpung/terlibat dalam politik. Dengan terhindarnya dari rasa takut tersebut akan membawa dampak positif terhadap partisipasi politik rakyat yang

otonom yang akhirnya akan menumbuh-kembangkan budaya demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam negara demokrasi, peran masyarakat dalam memberikan tuntutan dan dukungan sangat diperlukan demi kelancaran sebuah kebijakan yang akan direalisasikan. Banyak masyarakat yang menanggapi bahwa golput adalah pilihan, namun itu adalah persepsi yang keliru. Apalagi yang menanggapi semua calon sama saja itu merupakan hal yang salah. Kaum millennial sangat rentan dengan angka Golput. Sikap mereka yang sudah merasa kecewa dengan pemimpin-pemimpinnya membuat mereka enggan mengikuti proses pemilihan dan rendahnya rasa percaya diri peserta pemilu. Bahkan banyak dari mereka yang hanya antusias mengkritik pemerintah melalui media sosial dengan berbagai tindakan provokasi menjelang pilpres 2019. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.

Aspek-aspek pendidikan politik yang perlu selalu ditingkatkan kompetensinya oleh warga negara. Aspek-aspek pendidikan politik terdiri atas: (1) aspek kognitif merupakan aspek yang memberikan kontribusi dalam membangun pengetahuan politik warga negara; (2) aspek afektif yang memberikan kontribusi dalam membangun karakter dan keberpihakan warga negara dalam kehidupan demokrasi; dan (3) aspek psikomotor yang memberikan kontribusi dalam membangun kecakapan warga negara.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara Indonesia sangat membutuhkan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*), warga negara yang dapat

diandalkan oleh bangsa dan negara, yaitu warga negara yang memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kaitannya atau hubungannya dengan negara dan lingkungannya. Aspek-aspek tersebut merupakan muara yang berujung pada tindak keterlibatan atau partisipasi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kehidupan sosial dan politiknya.

Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi peneliti telah melaksanakan wawancara terhadap beberapa mahasiswa jurusan PPKn Stambuk 2017 Unimed mengenai aspek-aspek pendidikan politik. Dari hasil wawancara tersebut mahasiswa jurusan PPKn kurang mengerti dan tidak terlalu memperhatikan mengenai aspek-aspek pendidikan politik secara rinci. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka akan peran penting aspek-aspek pendidikan politik dalam membangun *civic skills*.

Murdiono (2010 : 19) Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang dimiliki oleh mahasiswa misalnya dapat dilihat dari kemampuannya mengkritisi kebijakan publik. Mahasiswa sebagai intelektual muda seharusnya dapat memiliki kekritisian terhadap setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam skala nasional maupun lokal. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah terkadang kurang menguntungkan bagi sebagian warga, dan sangat menguntungkan bagi sebagian yang lain. Fenomena yang muncul dalam keseharian, ada kecenderungan kurangnya kekritisian (sebagai bentuk *civic skills*) mahasiswa terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mahasiswa terkadang bersikap apatis terhadap segala sesuatu yang muncul sebagai akibat pengiring dari kebijakan yang muncul.

Selain itu, mahasiswa jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Unimed, juga ikut melaksanakan kegiatan pemilihan Presiden 2019 di daerah medan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Jurusan PPKn stambuk 2017 Unimed diperoleh informasi bahwa ia tidak memilih karena daerah pilihnya jauh dari rumah serta tidak mengetahui prosedur memilih bagi pemilih yang bertempat tinggal jauh. Kemudian ada yang tidak menggunakan hak suaranya karena faktor malas yaitu malas memilih karena kurangnya kepercayaan peserta pemilu pada kedua calon Presiden dan menganggap kedua pasangan calon Presiden sama saja. Dari pernyataan tersebut itu yang membuat sebagian mahasiswa golput atau tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu Presiden 2019.

Kemudian peneliti mewawancarai beberapa mahasiswa jurusan PPKn yang ikut memilih, jika dihubungkan dengan *civic skills* mereka memiliki kecakapan berpartisipasi (*participatory skills*) ikut berpartisipasi namun tidak memiliki kecakapan *intelektual*/berpikir kritis. Mereka hanya ikut-ikutan, sembarang memilih, tidak melihat visi dan misi kedua paslon Presiden, serta melihat dari luar saja (wajah, bentuk tubuh dan sebagainya) yang menarik dimata mereka. Kemudian ada yang memiliki kecakapan intelektual yaitu memiliki pengetahuan/ kognitif mereka mengetahui bahwa suara mereka berpengaruh untuk memenangkan salah satu pasangan, namun mereka tidak ikut berpartisipasi karena beberapa alasan yaitu karena kedua paslon sama saja dalam memimpin negara Indonesia. Sehingga dari pernyataan diatas sebagian mahasiswa PPKn belum memahami aspek-aspek pendidikan politik secara baik.

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan diatas, dalam memahami persoalan yang berkembang maka diperlukan suatu penelitian yang berjudul: “Pemahaman Aspek-Aspek Pendidikan Politik Mahasiswa Jurusan PPKn Stambuk 2017 FIS Unimed dalam Implementasi *Civic Skills* tentang Pemilihan Presiden 2019”.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah tentang Pemahaman Aspek-Aspek Pendidikan Politik Mahasiswa Jurusan PPKn Stambuk 2017 FIS Unimed dalam Implementasi *Civic Skills* tentang Pemilihan Presiden 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemahaman Aspek-Aspek Pendidikan Politik Mahasiswa Jurusan PPKn Stambuk 2017 FIS Unimed dalam Implementasi *Civic Skills* tentang Pemilihan Presiden 2019 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pemahaman Aspek-Aspek Pendidikan Politik Mahasiswa Jurusan PPKn Stambuk 2017 FIS Unimed dalam Implementasi *Civic Skills* tentang Pemilihan Presiden 2019”.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman penulis tentang Pemahaman Aspek-Aspek Pendidikan Politik Mahasiswa Jurusan PPKn Stambuk 2017 FIS Unimed dalam Implementasi *Civic Skills* tentang Pemilihan Presiden 2019.
2. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai bahan pemasukan dan sumbangan pemikiran bagi jurusan dan Fakultas Ilmu Sosial.